RENCANA KERJA

GEMAH RIPAH REPEH RAPIH

2017

RENJA

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT

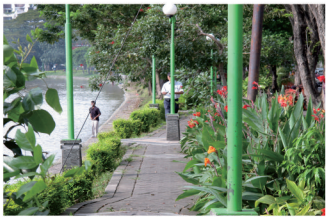

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Proses Penyusunan Renja 4

1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2016 dan Capaian Renstra 2013-2018 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 24

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraaan Tugas Pokok dan Fungsi 28

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2017 38

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017 75

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 78

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 78

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2017 80

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 82

BAB IV PENUTUP 101

LAMPIRAN v

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Pencapaian Indikator Sasaran 2016 Terhadap Target RPJMD 2013-2018 9
Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 14
Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 25
Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 42
Tabel II.5 Kajian Usulan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jawa Barat 2017 75

Tabel III.1 Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat.....78
Tabel III.2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Disperkim Tahun 2018.....83

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah 5

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan 29

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan perwujudan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Visi, Misi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat tahun 2017 merupakan penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan dalam Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan isu strategis dan potret pembangunan perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa fokus pelaksanaan kegiatan tahun 2017. Adapun kegiatan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2017 yaitu: (1) Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di sembilan lokasi; (2) Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Perdesaan; (3) Pembangunan stimulan 10.000 unit rutilahu; (4) Penataan kawasan permukiman kumuh; (5) Penyediaan infrastruktur dasar permukiman; (6) Pengelolaan dan pelayanan perumahan BP3JB; dan (7) Penyediaan penetapan lokasi kegiatan strategis nasional dan provinsi mencakup Pelabuhan Patimban, Kereta Api Cepat Indonesia-China, dan LRT Jabodetabek.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban dan mewujudkan perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dan handal.

Bandung, Mei 2016

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT

Ir. Bambang Rianto, M. Sc.
NIP. 196201161991031004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2013-2018, sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat menggantikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008. Disperkim merupakan pelaksana pembangunan sektor perumahan dan permukiman serta pertanahan di Jawa Barat yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu **"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"**.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
37. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
39. Surat Edaran Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat No. 050/378/PPD Perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2017 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Disperkim. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Disperkim Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. Renja juga harus mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat dan diterjemahkan menjadi Renstra Disperkim 2013-2018. Terkait dengan adanya perubahan SOTK, maka Renja Disperkim tahun ini merupakan dokumen yang sangat penting bagi seluruh bidang. Adapun tujuan penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2017;
2. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Jawa Barat pada tahun 2017;
3. Menyediakan arahan bagi aparatur Disperkim Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Disperkim Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2017.

1.4 Proses Penyusunan Renja

Paradigma penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat diwarnai paradigma perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2017 yang mengacu pada perencanaan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Resources availabillity and Time*) yang merupakan pendekatan dalam perencanaan program dan kegiatan, dan *Shewhart Cycle* (*Plan-Do-Ceck-Act*) yang merupakan perencanaan yang berbasis evaluasi diri dan partisipatif. Penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dilakukan melalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu pendekatan

politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Proses penyusunan Renja Disperkim Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui empat tahapan, yakni (1) Penyusunan Rencana, (2) Penetapan Rencana, (3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Penyusunan Renja di daerah harus sinergis dengan perencanaan di pusat. Sinergi perencanaan pusat dan daerah dapat dilihat pada **Gambar I.1**.

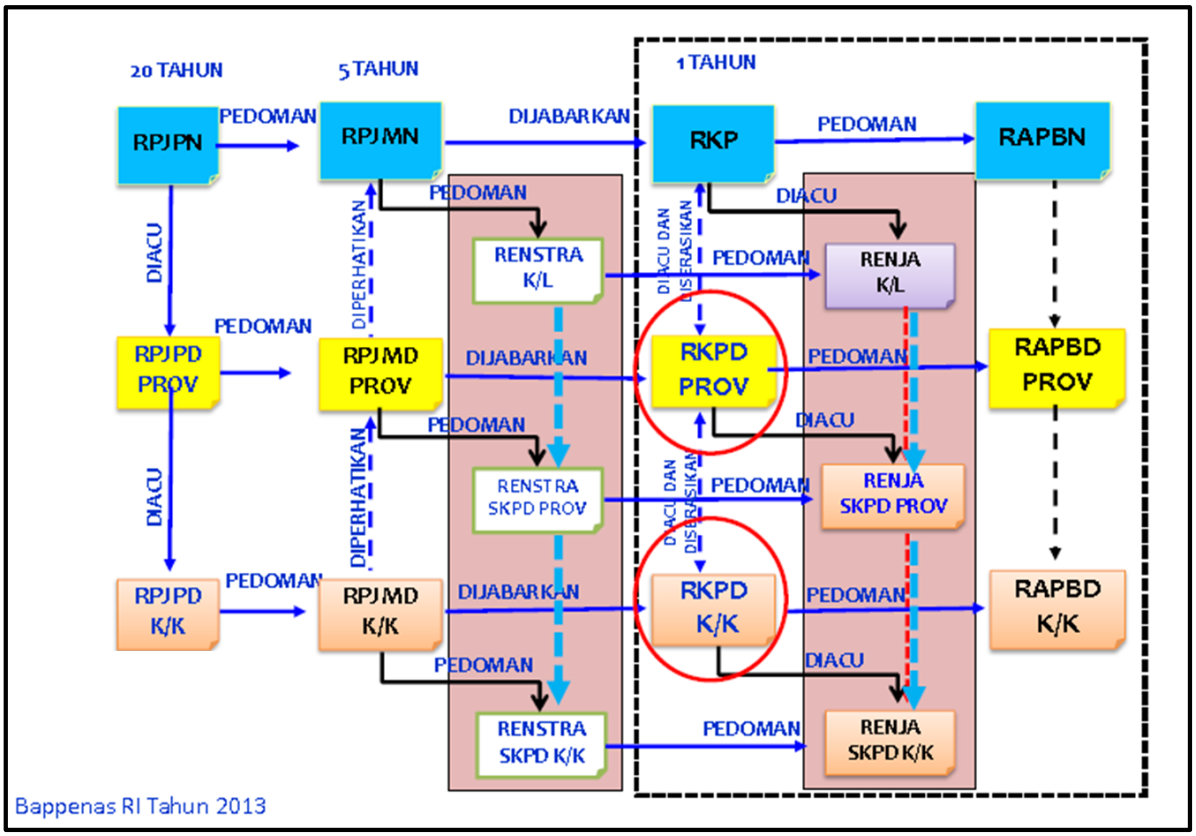

Gambar I.1 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Disperkim Provinsi Jawa Barat tahun 2017 terdiri empat bab yang dapat diurai dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Proses Penyusunan Renja

1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra tahun 2013-2018
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperkim
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disperkim
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2017
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2016 dan Capaian Renstra 2013-2018

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, yang tertuang dalam sasaran setiap misi. Visi Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yaitu:

"TERWUJUDNYA PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN
YANG LAYAK, TERJANGKAU DAN BERKELANJUTAN

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Layak : Mendorong pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Terjangkau : Dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berkelanjutan : Memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi berikut:

1. Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Didukung oleh Infrastruktur Permukiman yang Handal;

2. Menyiapkan Perencanaan Pengadaan Lahan dan Menertibkan Tata Kelola Pertanahan;
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance*.

Upaya yang dilakukan oleh Disperkim tidak terlepas dari Visi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu "**JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**" dan fokusnya pada Misi Keempat yaitu **Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan**. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperkim sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (**Tabel II.1**).

Berdasarkan RPJMD 2013-2018, kinerja program infrastruktur ditunjukkan dengan realisasi pencapaian indikator kinerja daerah. Cakupan pelayanan air minum pada tahun 2016 meningkat 4% dari 67,13% pada tahun 2015 menjadi 71,14%. Cakupan pelayanan air limbah domestik meningkat sebesar 0,6% dari 65,03% pada tahun 2015 menjadi 65,64% pada tahun 2016. Nilai peningkatan yang sama terjadi pada cakupan pelayanan persampahan perkotaan sehingga menjadi 66,26% pada tahun 2016.

Tabel II.1 Pencapaian Indikator Sasaran 2016 Terhadap Target RPJMD 2013-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA (PENYESUAIAN)		SATUAN	REALISASI			TARGET 2017	TARGET RPJMD 2018
					2014	2015	2016		
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	**Meningkatknya jumlah rumah layak huni** (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 5/Strategi 1/Kebijakan 1)	1.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.43	92.7	92.78	93.89	94.49
2	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak** (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 3/Strategi 1/Kebijakan 1 & 2)	2.1	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	persen	65.43	67.13	71.14	73	74
3	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak** (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 4/Strategi 1/Kebijakan 1)	3.1	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik	persen	63.59	65.03	65.64	67	68
4	**Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan timbulan sampah di sumber dengan pola 3R** (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 1/Strategi 1/Kebijakan 1 & 2)	4.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, Pengurangan sampah di sumber dengan pola 3R	persen	64.88	65.65	66.26	69	70

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA (PENYESUAIAN)		SATUAN	REALISASI			TARGET 2017	TARGET RPJMD 2018
					2014	2015	2016		
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
5	**Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman** (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 5/Strategi 1/Kebijakan 2)	5.1	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	persen	100%	91.82%	87.71%	84.84%	81.97%
6	**Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman** (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 5/Strategi 1/Kebijakan 2)	6.1	Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	lokasi	*	*	*	5	N/A
7	Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan	7.1	Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	persen	*	*	*	100	100
		7.2	Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	persen	*	*	*	20	40
		7.3	Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)	kawasan	*	*	*	5	10

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA (PENYESUAIAN)		SATUAN	REALISASI			TARGET 2017	TARGET RPJMD 2018
					2014	2015	2016		
[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
8	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	8.1	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)	orang	1	60	65	28	N/A
9	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	9.1	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	persen	N/A	82.64	78	85	N/A

*Sasaran dan indikator sasaran baru di tahun 2017, sehingga tidak terdapat data realisasi di tahun sebelumnya

Sumber: Renstra 2013-2018 Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2017

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2013-2018, untuk tahun 2016 target cakupan pelayanan air minum adalah 63-70%, target cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 64-65%,dan target cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 65-67%, maka cakupan pelayanan air minum, air limbah domestik, dan cakupan pelayanan persampahan telah mencapai target.

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2013-2018, terdapat indikator kinerja lain yang mencerminkan pelayanan Disperkim terhadap masyarakat. Indikator Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman yang dibangun pada tahun 2016 berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH). Realisasi pembangunan RTH pada tahun 2016 adalah dua unit. Jumlah RTH yang sama terbangun pada tahun 2015. Untuk mencapai target RPJMD 2013-2018 yaitu 10 unit PSU terbangun, Provinsi Jawa Barat masih ada *gap* sebanyak lima unit.

Aspek daya saing daerah ditandai dengan kemampuan ekonomi daerah yang ditunjukan dengan indikator daya beli, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekspor, dan inflasi. Sebagai salah satu indikator daya beli, pada tahun 2017 telah dilaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 2.000 unit di perkotaan dan 8.000 unit di perdesaan.

Beberapa hal yang mendorong pencapaian target antara lain:

1. Adanya dukungan dari seluruh stakeholders di Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan target capaian yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2013-2018 dan Janji Gubernur.
2. Adanya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat khususnya dari APBN murni dan pinjaman hibah luar negeri untuk mencapai target RAD 100-0-100, yaitu pencapaian 100% akses air minum, 0% luas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi sesuai dengan target RPJMN 2019.
3. Melakukan percepatan pencapaian target Gerakan 100-0-100 khususnya dalam penanganan air minum, permukiman kumuh, dan sanitasi dengan mengembangkan dan mendorong komitmen pendanaan dari pemerintah pusat serta melalui peningkatan peran pemerintah baik dari level pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota terkait pencapaian penanganan kawasan kumuh dari pemerintah provinsi. Keterbatasan dana diharapkan

membuat daerah dalam hal ini kabupaten/kota menggali peluang pendanaan lain di luar pemerintahan untuk penanganan kawasan kumuh di daerahnya.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target adalah:

1. Kurangnya armada pengangkut sampah khususnya di perkotaan sehingga sulit mencapai target cakupan pelayanan persampahan perkotaan. Penambahan armada pengangkut sampah di perkotaan dapat dilakukan dengan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.
2. Berubahnya jumlah dan lokasi kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati mengakibatkan berkurangnya nilai capaian target pengurangan luasan kawasan kumuh. Sebaiknya identifikasi kawasan kumuh dilakukan dengan cepat dan jumlahnya ditetapkan berlandaskan peraturan perundangan di tingkat provinsi.

Untuk lebih jelasnya target dan pencapaian kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2015-2017 dapat dilihat pada **Tabel II.2**.

Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1				**URUSAN WAJIB**										
1	5			**Bidang Urusan Penataan Ruang**										
1	5	11		**Program Sumber Daya Kesehatan**							**100%**			**100%**
1	5	11	74	Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat	RS Paru, Provinsi Jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	10 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%
1	5	11	75	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Daerah Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat	RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut									
1	5	25		**Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**			**70,67%**				**90,89%**			**100,01%**
				Bidang Permukiman - Seksi Air Minum										
1	5	25	1	Pengembangan SPAM Perdesaan	Provinsi Jawa Barat	Cakupan Pelayanan Air Minum	74,00%	65,43%	70%	67,13%	95,90%	70%	71,14%	101,63%
1	5	25	2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									
1	5	25	3	METR Pengembangan SPAM Metropolitan Bandung Raya	Metropolitan Bandung Raya									
1	5	25	4	METR Penyusunan Rencana Induk SPAM Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									
1	5	25	5	Penyusunan Kebijakan SPAM Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									
				Bidang Permukiman - Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman										
1	5	25	6	GCB-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum	Kabupaten Bandung	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	68,00%	63,59%	70%	65,03%	92,9%	65%	65,64%	100,98%

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	25	7	SANI-Monitoring dan Evaluasi Teknis Pembangunan Sanitasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									
1	5	25	8	Konsep Pembangunan *Public Art Work Sister Province* Jawa Barat dan Australia Selatan	Kota Bandung									
1	5	25	9	PPP-Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah, dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu	Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi									
1	5	25	10	PPP - Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	Kabupaten Garut; Kabupaten Cianjur									
1	5	25	11	PPP-Penyusunan Rencana Induk Drainase, Air Limbah dan Persampahan Perkotaan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	Kabupaten Pangandaran									
1	5	25	12	METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Cirebon Raya	Kota Cirebon; Kabupaten Cirebon; Kabupaten Kuningan									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	25	13	METR-Penyusunan Review Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bandung Raya	Kota Bandung; Kota Cimahi; Kabupaten Bandung Barat; Kabupaten Suemdang; Kabupaten Bandung									
1	5	25	14	METR - Penyusunan Rencana Induk Drainase dan Air Limbah Perkotaan di Metropolitan Bodebekkarpur	Kota Depok; Kota Bogor; Kota Bekasi; Kabupaten Bogor; Kabupaten Bekasi; Kabupaten Karawang; Kabupaten Purwakarta									
				Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR)										
1	5	25	15	Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka	Kabupaten Bandung	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	70,00%	64,88%	68%	65,65%	65,65%	96,54%	66,26%	97,44%
1	5	25	16	Pembangunan TPPAS Regional Nambo	Kabupaten Bogor									
1	5	25	17	Pengelolaan TPK Sarimukti	Desa Sarimukti, Kec. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat									
1	5	25	18	Advisory teknis BPSR	Kota Bandung									
1	5	25	19	Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan TPPAS Regional Ciayumajakuning	Kabupaten Cirebon									
1	5	25	20	Penataan TPA Leuwigajah	Kabupaten Bandung Barat; Kota Cimahi									
				Bidang Permukiman - Seksi Penataan Bangunan Lingkungan										
1	5	25	21	Perencanaan dan Pembangunan Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Jawa Barat	Kota Bandung	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	10 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%
1	5	25	22	Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage	Kota Bandung									
1	5	25	23	Penataan Kawasan Gasibu Tahap II	Kota Bandung									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	25	24	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa	Kabupaten Bandung; Kabupaten Bandung Barat; Kota Bandung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	10 kawasan	1 kawasan	92,69%	92,70%	100,01%	92,78%	92,78%	100%
1	5	26		**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**			*				**94,64%**			**131,05%**
1	5	26	1	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Provinsi Jawa Barat	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	*	27%	30,7%	27,41%	89,28%	31%	50,25%	162,10%
1	5	26	2	Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi	Provinsi Jawa Barat									
1	5	26	3	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara	Provinsi Jawa Barat	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	*	N/A	80%	80%	100%	80%	80%	100%
1	5	27		**Program Penataan Ruang**			*				**62,50%**			**90,59%**
				Bidang Tata Ruang & Kawasan										
1	5	27	1	Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP Sukabumi Bagian Selatan	Kabupaten Sukabumi	Jumlah Ketersediaan Perda RTR KSP di Jawa Barat	*	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	5	27	2	METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Gunung Sindur Kabupaten Bogor	Gunung Sindur, Kabupaten Bogor									
1	5	27	3	METR Perencanaan Kawasan Perkotaan*Water Front City* Cirebon	Kota Cirebon									
1	5	27	4	METR Perencanaan Kawasan Perkotaan Kota Pendidikan Jatinangor	Jatinangor, Kab. Sumedang									
1	5	27	5	CLTH-Perencanaan Pengembangan Ciletuh Bidang Permukiman dan Perumahan	Ciletuh, Sukabumi									
1	5	27	6	Penyusunan Studi Kelayakan Penataan Karst Citatah	Citatah, Kabupaten Bandung Barat									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	27	7	Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	10 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%
				Bidang Tata Ruang & Kawasan										
1	5	27	8	Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Perda RDTR Kabupaten/Kota di Jawa Barat	*	0%	2 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	2 dokumen	66,67%
				Bidang Tata Ruang & Kawasan										
1	5	27	9	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Hasil Review RTRWP Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	*	0%	60%	60%	100%	70%	67%	95,71%
1	5	27	10	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									
1	5	27	11	Kajian Kelayakan Kawasan Perkotaan Kota Raya Walini	Kabupaten Bandung Barat									
1	5	29		**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**			**85%**				**97,65%**			**91,76%**
1	5	29	1	Perencanaan Lingkup Bidang Permukiman dan Perumahan	Kota Bandung	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85%	N/A	85%	82,64%	97,65%	85%	78%	91,76%
1	4	31		**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**94,49%**				**100,01%**			**100%**
1	5	31	1	Kajian Lingkungan Pembangunan RUSUNAWA di Kab. Bandung Barat dan Kota Bogor	Kab. Bandung Barat; Kota Bogor	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94,49%	92,43%	92,69%	92,70%	100,01%	92,78%	92,78%	100%
1	5	31	2	Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan Perumahan	Provinsi Jawa Barat									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	31	3	Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan	Provinsi Jawa Barat									
1	5	31	4	Perencanaan dan Identifikasi Lokasi Pembangunan Rusunawa di KSP Jatinangor, Kota/Kab. Sukabumi dan Kab/Kota. Cirebon	Jatinangor, Kab. Sumedang; Kab. Sukabumi; Kota Sukabumi; Kab. Cirebon; Kota Cirebon									
1	5	31	5	RTLH Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	Kota Bandung; Kota Bogor; Kota Cimahi; Kota Sukabumi; Kota Tasikmalaya; Kota Banjar; Kota Depok; Kota Cirebon; Kota Bekasi (9 kota)									
1	5	31	6	Pendataan Bidang Perumahan di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat									
1	5	31	7	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bandung Raya	Metropolitan Bandung Raya									
1	5	31	8	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Cirebon Raya	Metropolitan Cirebon Raya									
1	5	31	9	METR - Program Prioritas Pengembangan Perumahan di Metropolitan Bodebekkarpur	Metropolitan Bodebekkarpur									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	31	10	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pangandaran	Kabupaten Pangandaran									
1	5	31	11	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu	Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi									
1	5	31	12	PPP - Program Prioritas Pengembangan perumahan di Pusat Pertumbuhan Rancabuaya	Rancabuaya, Kabupaten Garut									
1	5	31	13	Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat	Kab. Cirebon; Kab. Sukabumi; Kab. Pangandaran; Kab. Garut; Kab. Sumedang; Kota Bandung									
1	5	33		**Program Pembinaan, Pemasyarakatan, dan Pengembangan Olahraga**							**100%**			**100%**
1	5	33	1	PONPAR Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Non Permanen Pendukung Venue PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat	16 kab./kota Provinsi Jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	10 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%
1	5	33	2	PONPAR Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 Jawa Barat	Kab. Sumedang; Kab. Bandung Barat; Kab. Karawang									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	59		**Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**							**200%**			**162,5%**
1	5	59	1	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	**	1 orang	30 orang	60 orang	200%	40 orang	65 orang	162,5%
1	5	59	2	Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL-Diskimrum	Kota Bandung; Provinsi DKI Jakarta									
1	5	59	3	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB	Kota Bandung									
1	5	59	4	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung									
1	5	60		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**85%**				**118,62%**			**192,66%**
1	5	60	1	Peningkatan dan Pelayanan BPMKL	Kota Bandung	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	*	N/A	1.200 sampel	1.675 sampel	139,58%	1.320 sampel	3.875 sampel	293,56%
1	5	60	2	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85%	N/A	85%	82,64%	97,65%	85%	78%	91,76%
1	5	60	3	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum	Kota Bandung									
1	5	60	4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat; Provinsi DKI Jakarta									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	60	5	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR	Kota Bandung									
1	5	61		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**85%**				**97,65%**			**91,76%**
1	5	61	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi)	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85%	N/A	85%	82,64%	97,65%	85%	78%	91,76%
1	5	61	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									
1	5	61	3	Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB	Kota Bandung									
1	5	61	4	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung									
1	5	62		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**85%**				**97,65%**			**91,76%**
1	5	62	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Cimahi	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85%	N/A	85%	82,64%	97,65%	85%	78%	91,76%
1	5	62	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung									
1	5	62	3	Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung									
1	5	62	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL	Kota Bandung									

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program *(Outcome)*/ Kegiatan *(Output)*	Target Renstra 2018	Realisasi Target 2014	Realisasi Target 2015			Target Renja 2016	Perkiraan Realisasi Target 2016	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Capaian (%)
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	5	65		**Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah**			**85%**				**97,65%**			**91,76%**
1	5	65	1	Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan	Kota Bandung	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85%	N/A	85%	82,64%	97,65%	85%	78%	91,76%
1	5	66		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**			**85%**				**97,65%**			**91,76%**
1	5	66	1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal	Kota Bandung	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan	85%	N/A	85%	82,64%	97,65%	85%	78%	91,76%
1	5	77		**Program Pengembangan Nilai Budaya**							**100%**			**100%**
1	5	77	1	Penyusunan DED Museum Jatigede	Kota Bandung	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	10 kawasan	1 kawasan	2 kawasan	2 kawasan	100%	2 kawasan	2 kawasan	100%

Catatan:

(*) Sasaran dan indikator sasaran tidak lagi menjadi wewenang Diskimrum (Disperkim) sejak perubahan SOTK tahun 2017

(**) Masih menunggu konfirmasi

Sumber: Renstra 2013-2018 Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 | LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan 2016 | Rencana Kerja Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan 2016

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat Visi dan Misi pembangunan daerah serta Isu Strategis. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tujuan dari efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase penyelamatan (*rescue*), fase pemulihan (*recovery*), fase pemantapan (*stabilization*), fase pembangunan (*development*) dan fase melaju (*steady*).

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Jawa Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang pekerjaan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 500 Tahun 2014 tentang Fokus Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Barat yang terdiri atas 37 program dan kegiatan unggulan Provinsi Jawa Barat, yang terkait pekerjaan umum, yakni Rehabilitasi 100 ribu rumah rakyat miskin, Penanganan Banjir Cileuncang di Kota Bandung dan Kota Bekasi, Pengelolaan Terintegrasi DAS Citarum, DAS Ciliwung dan DAS Cimanuk, Sanitasi Lingkungan Kab/Kota dan Pembangunan Masjid Monumental Jawa Barat di 5 Wilayah.

Untuk lebih jelasnya pencapaian pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada **Tabel II.3**.

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperkim Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK 2016	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[6]	[7]	[9]	[9]	[11]	[11]	[13]
Hasil Analisis Standar Kebutuhan												
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	92,70%	92,78%	93,89%	94,49%	92,70%	92,78%	93,89%	94,49%	tidak terdapat indikator kinerja terkait rumah layak huni di dalam SPM maupun IKK
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	81,77%	**	67,13%	71,14%	73,00%	74,00%	67,13%	71,14%	73%	74%	-
3	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik	60%	62,27%	65,03%	65,64%	67,00%	68,00%	65,03%	65,64%	67%	68%	-
4	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, Pengurangan sampah di sumber dengan pola 3R	70%	**	65,65%	66,26%	69,00%	70,00%	65,65%	66,26%	69%	70%	-

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK 2016	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[6]	[7]	[9]	[9]	[11]	[11]	[13]
Hasil Analisis Standar Kebutuhan												
5	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	10%	-	91,82%	87,71%	84,84%	81,97%	91,82%	87,71%	84,84%	81,97%	tidak terdapat indikator kinerja terkait kawasan kumuh di dalam IKK
6	Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	50%	-	*	*	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	*	5 lokasi	5 lokasi	tidak terdapat indikator kinerja terkait PSU wewenang Disperkim di dalam IKK
7	Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	-	-	*	*	100%	100%	*	*	100%	100%	tidak terdapat indikator kinerja terkait pengadaan tanah, pemanfaatan tanah, maupun data di dalam SPM dan IKK
8	Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	*	*	20%	40%	*	*	20%	40%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK 2016	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[6]	[7]	[9]	[9]	[11]	[11]	[13]
Hasil Analisis Standar Kebutuhan												
9	Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)	-	-	*	*	5 lokasi	10 lokasi	*	*	5 lokasi	10 lokasi	

Catatan:
(*) Sasaran dan indikator sasaran baru di tahun 2017 dan 2018, sehingga tidak terdapat data realisasi di tahun sebelumnya
(**) Nilai IKK masih dalam proses perhitungan

Sumber: LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, 2016

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraaan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2017 merupakan tahun pertama diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab provinsi dalam menjalankan urusan pembangunan, sehingga akan berdampak kepada perubahan program dan kegiatan pembangunan, serta alokasi penganggaran. Sehubungan dengan belum terbitnya Peraturan Pemerintah untuk Undang-Undang dimaksud, maka dokumen RKPD Tahun 2017 dapat dikatakan disusun pada masa transisi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi dan peran pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Untuk mempermudah menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya dibantu satu Sekretariat; empat Bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan; satu UPTD yaitu Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (BP3JB); serta kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat maka Struktur Organisasi Disperkim dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut.

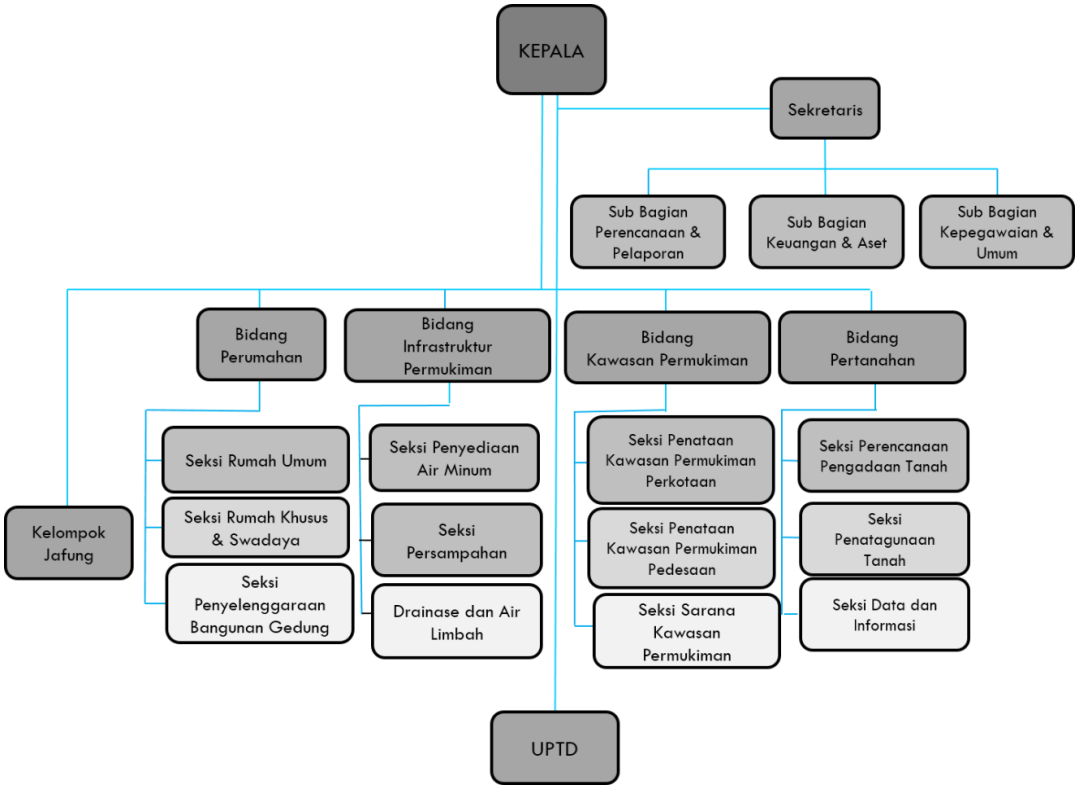

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Tugas Pokok dan Fungsi Disperkim adalah:

1. **Tugas Pokok**

   Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan meliputi izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong dan penggunaan tanah yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun fungsi dari Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-bidang. Adapun fungsi sekretariat yaitu:

a. Penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan perumahan meliputi Rumah Umum, Rumah Khusus dan Swadaya, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Adapun fungsi bidang perumahan yaitu:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman aspek rumah umum, rumah khusus dan swadaya serta penyelenggaraan bangunan gedung;
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian aspek rumah umum, rumah khusus dan swadaya serta penyelenggaraan bangunan gedung;

c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Infrastruktur Permukiman

Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman meliputi penyediaan prasarana air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyelenggaraan bangunan gedung. Adapun fungsi bidang infrastruktur permukiman yaitu:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman aspek penyediaan prasarana air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan penyelenggaraan bangunan gedung;
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian aspek penyediaan prasarana air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan penyelenggaraan bangunan gedung;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur Permukiman; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Urusan Kawasan Permukiman meliputi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan, Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Sarana Kawasan Permukiman. Adapun fungsi bidang kawasan permukiman yaitu:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman aspek Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan, Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan dan Sarana Kawasan Permukiman;
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian aspek penataan kawasan permukiman perkotaan, penataan kawasan permukiman perdesaan dan sarana kawasan permukiman;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan meliputi Perencanaan Pengadaan Tanah, Penatagunaan Tanah, serta Data dan Informasi. Adapun fungsi bidang pertanahan yaitu:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan aspek perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan tanah serta data dan informasi;
b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan tanah serta data dan informasi;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan; dan
d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun **Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat** (BP3JB) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional/tugas teknis penunjang di Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat, meliputi pengelolaan dan pelayanan perumahan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan fungsinya adalah:

a. pelayanan penyediaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
b. penyiapan kepemilikan rumah untuk MBR; dan
c. penurunan *backlog* (kekurangan penyediaan rumah).

Pelayanan BP3JB memberikan kontribusi dan manfaat langsung yang nyata untuk masyarakat. Beberapa kontribusi BP3JB yaitu:

a. Dengan adanya BP3JB, masyarakat khususnya MBR yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dapat menggunakan apartemen transit ini sementara bersamaan.
b. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh.
c. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR.
d. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak huni dan terjangkau terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan, dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu.
e. Ditinjau dari aspek persyaratan dan prosedur penyelesaian pelayanan, tingkat kemudahan pelayanan BP3JB TA 2016 adalah sebesar 76,4% atau terkategori

baik, dengan demikian maka BP3JB dinilai telah berkontribusi secara langsung dan nyata dalam pelayanan perumahan di Provinsi Jawa Barat

f. Ditinjau dari aspek waktu penyelesaian pelayanan, tingkat kecepatan pelayanan BP3JB TA 2016 adalah sebesar 74% (baik), dengan demikian maka BP3JB dinilai telah berkontribusi secara langsung dan nyata dalam pelayanan perumahan di Provinsi Jawa Barat.

2.3.1 Tingkat Pelayanan dan Hal Kritis terkait Pelayanan Disperkim Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Jawa Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 yang dijabarkan secara rinci kedalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018, kedudukan RKPD Tahun 2017 berada pada tahapan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh. Pada tahapan tersebut pelaksanaan pembangunan Tahun 2017 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya:

1. Jumlah penduduk yang tinggi;
2. Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah;
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya alih kelola pendidikan jenjang menengah;
4. Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat;
6. Dinamika ekonomi global termasuk diberlakukakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak akhir Tahun 2015 yang menuntut persaingan baik tenaga kerja maupun produksi dalam negeri;
7. Masih tingginya degradasi lingkungan;
8. Meningkatnya kebutuhan pangan baik untuk Jawa Barat maupun Nasional;
9. Perlunya komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
10. Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Seluruh tantangan tersebut ditujukan untuk keberhasilan pembangunan Jawa Barat yang meliputi tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3)

dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa dan perbatasan.

Keberhasilan dalam mewujudkan kedudukan dan mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka penyusunan RKPD Tahun 2017 diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.

Isu strategis Pembangunan yang dihadapi Bidang Permukiman dan Perumahan dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur antara lain adalah:

1. Pengembangan wilayah yang belum ditunjang dengan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman.
2. Rencana pengembangan infrastruktur strategis yang sesuai dengan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berjumlah 24 KSP. Untuk yang mendatang diperlukan perencanaan infrastruktur permukiman strategis di KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity, KSP Hulu Sungai Citarum, KSP Pesisir Pantura, dan KSP Pangandaran dan sekitarnya.
3. Tingkat Urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun backlog yang ada sebelumnya.
4. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layananan di bidang perumahan dan permukiman.
5. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
6. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam turut menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal.
7. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata.
8. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan.

Isu yang mendasari Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2017 adalah prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, di antaranya prioritas

pembangunan daerah no 4 yaitu **Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar Permukiman dan Infrastruktur Strategis di Perkotaan dan Perdesaan**, dengan sasaran:

1. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi.
2. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.
3. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

Isu pembangunan perumahan dan permukiman lainnya adalah rehabilitasi 100.000 rumah rakyat miskin yang merupakan 1 (satu) dari 8 (delapan) janji Gubernur Jawa Barat periode tahun 2013–2018.

Sedangkan arahan perencanaan dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat adalah :

1. Percepatan pencapaian *Universal Access* 100-0-100 tahun 2019 yaitu tercapainya akses infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat serta tertanganinya seluruh kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur di dalamnya.
2. Keterpaduan Usulan Pembangunan Bidang Cipta Karya yang terbagi pada Prioritas Kabupaten/Kota Strategis Nasional (KSN) Provinsi Jawa Barat.
3. Dukungan pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diprioritaskan sektoral.
4. Program/kegiatan pada tingkatan lingkungan/komunitas bersifat pemberdayaan masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disperkim Provinsi Jawa Barat

Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan dan permukiman antara lain:

1. Tingkat Urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang ada sebelumnya.
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layananan di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan.
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR). Hal ini juga disebabkan belum optimalnya sinergi lintas sektor dan instansi dalam penanggulangan masyarakat miskin atau MBR.

4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal.
5. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata.
6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan khususnya bidang permukiman dan perumahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di lingkup Provinsi Jawa Barat, maka tantangan dan peluang pengembangan bidang perumahan dan permukiman antara lain sebagai berikut:

1. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (Undang-undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang menguatkan kembali peran provinsi dalam otonomi daerah.
2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait bidang perumahan dan permukiman yang menegaskan peran provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.
3. Pentingnya menekankan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Nasional dan Daerah.
4. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal.
5. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).

Sedangkan ancaman yang ada antara lain:

1. Sulitnya menekan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan prasarana dan sarana.
2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan bidang perumahan dan permukiman.

3. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.
4. Menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang kegiatan perumahan dan permukiman (air, tanah, udara) yang disebabkan adanya perubahan iklim global.

Untuk itu dilakukan analisis indikator kinerja yang telah disusun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja ini dinaungi oleh Renstra Kementerian serta Renstra Dinas bidang perumahan dan permukiman Kabupaten/Kota.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkim Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Jawa Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 yang dijabarkan secara rinci kedalam dok RPJMD Tahun 2013-2018, kedudukan RKPD Tahun 2018 berada pada tahap awal untuk mencapai kemandirian. Pada tahapan tersebut pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya:

1. Jumlah penduduk yang tinggi;
2. Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah;
3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya alih kelola pendidikan jenjang menengah;
4. Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat;
6. Dinamika ekonomi global termasuk diberlakukakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak akhir Tahun 2015 yang menuntut persaingan baik tenaga kerja maupun produksi dalam negeri;
7. Masih tingginya degradasi lingkungan;
8. Meningkatnya kebutuhan pangan baik untuk Jawa Barat maupun Nasional;
9. Perlunya komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
10. Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Seluruh tantangan tersebut ditujukan untuk keberhasilan pembangunan Jawa Barat yang meliputi tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan

energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa dan perbatasan.

Keberhasilan dalam mewujudkan kedudukan dan mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2017

Berdasarkan data 2015, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 46.709.569 jiwa. Sementara laju pertumbuhannya mengalami penurunan dari 1,52 persen pada 2014 menjadi 1,47 persen pada 2015. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk Jawa Barat pada 2015 antara laki laki dengan perempuan adalah 50,72 % berbanding 49,28 %. Kondisi perekonomian sebagai indikasi kesejahteraan masyarakat, ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan inflasi. LPE Jawa Barat 2015 terjadi penurunan menjadi 5,06 persen dari 5,07 persen pada 2014, sedangkan inflasi dapat ditekan dari 9,15 pada 2014 menjadi 2,73 persen pada 2015. Kondisi ini menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan penekanan inflasi cukup baik pada 2014 sampai dengan 2015, diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan perbandingan wilayah perkotaan dan perdesaan, peningkatan penduduk miskin di wilayah perkotaan Jawa Barat pada 2015 sebanyak 2.706.520 orang (8,58% terhadap jumlah penduduk perkotaan), dan di perdesaan sebanyak 1.779.134 orang (11,61% terhadap total penduduk perdesaan) (BPS, 2015).

Aspek daya saing daerah ditandai dengan kemampuan ekonomi daerah yang ditunjukan dengan indikator daya beli, laju pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekspor, dan inflasi. Sebagai salah satu indikator daya beli, pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di perkotaan sebanyak 653 unit di dengan perbaikan fisik rumah tidak layak huni di 8 (delapan) kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar dan Kota Depok.

Pembangunan Daerah tahun 2017 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang menekankan pada diversifikasi pembangunan Jawa Barat menuju pemantapan

pembangunan secara menyeluruh, untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu:

"***Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua***"

Berdasarkan situasi lingkungan strategis eksternal dan internal, maka dirumuskan 16 (enam belas) isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang dikelompokan berdasarkan rujukan aspek kinerja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

1. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:
    a. Ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan;
    b. Kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    c. Konflik sosial (SARA); dan
    d. Ketahanan keluarga.
2. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:
    a. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
    b. Aksesibilitas dan kualitas kesehatan;
    c. Kualitas, kuantitas, dan cakupan pelayanan dasar serta infrastruktur strategis di perdesaan dan perkotaan; dan
    d. Pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:
    a. Aksesibiltas, kualitas, dan daya saing ketenagakerjaan;
    b. Peran dan daya saing industri kecil dan menengah;
    c. Pengelolaan destinasi wisata;
    d. Kesadaran politik dan penegakan hukum;
    e. Peran pemuda dalam pembangunan;
    f. Prestasi pemuda dalam bidang olahraga;
    g. Kualitas lingkungan hidup; dan
    h. Penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk mempercepat pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, ditetapkan 5 misi yang memiliki tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Bidang Perumahan dan Permukiman termasuk pada Misi Keempat yaitu **Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.** Tujuan dan sasaran misi keempat ini adalah:

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasaran *pertama*, Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan *Kedu*a, Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Program pembangunan yang berkaitan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman adalah yang termasuk ke dalam prioritas pembangunan tahun 2017 nomor 4 yaitu penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan dengan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi.

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kegiatan Prioritas:

1. Pembangunan jaringan air bersih/air minum.
2. Sosialisasi Prilaku Hidup Bersih Sehat.
3. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.
4. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan.
5. Pembangunan Waduk, Bendung, Situ, dan Embung sebagai penyedia air baku.
6. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di wilayah Metropolitan.
7. Pembangunan IPAL Regional di wilayah Metropolitan.

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Kegiatan Prioritas:

1. Pembangunan TPPAS Legok Nangka
2. Pembangunan TPPAS Nambo
3. Operasionalisasi TPA Sarimukti

Sasaran Program : Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

Program **:** Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Prioritas:

1. Penanganan Kawasan Kumuh
2. Pembangunan Rutilahu Perkotaan
3. Pembangunan Rutilahu Perdesaan

Adapun pada hasil penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Diskimrum dalam menangani proses pembangunan bidang permukiman dan perumahan Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada **Tabel II.4**.

Pada **Tabel II.4** tertera bahwa usulan Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2017 mencapai **Rp759.265.550.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**. Namun, berdasarkan hasil analisis kebutuhan terjadi penyesuaian anggaran menjadi **Rp193.615.748.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).**

Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
	URUSAN WAJIB				**759.266**		**URUSAN WAJIB**				**193.616**
	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**193.616**
	Program Pembinaan Jasa Konstruksi				**3.450**		**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**				**500**
26	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara	Provinsi Jawa Barat	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas	33-35%	600	3	Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara	Jawa Barat	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas	33-35%	500
27	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Provinsi Jawa Barat	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas	33-35%	2.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
28	Pengaturan Jasa Konstruksi	Kota Bandung	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang berkualitas	33-35%	850		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman				**102.400**		**Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**				**36.480**
9	Pengembangan SPAM Regional	Metropolitan Cirebon Raya dan Metropolitan Bandung	Cakupan layanan air minum oleh SPAM Regional	45%	33.700	40	Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan	Metropolitan Bandung Raya	Cakupan layanan air minum oleh SPAM Regional	45%	30.565
	Kegiatan baru.					41	Penyelenggaraan Program Pamsimas	Seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya program Pamsimas	15 kab	458
5	Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Cakupan Pelayanan Air Minum	73-74%	750	42	Penyusunan Kajian Teknis Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Tersusunnya Kajian Teknis Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat	1 doku-men kajian	60

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
	Kegiatan baru.					43	Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung	Metropolitan Bandung Raya	Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di Metropolitan Bandung Raya	1 dokumen	975
4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Kawasan PKN-p Rancabuaya	PKN-p Rancabuaya	Cakupan layanan air minum oleh SPAM Regional	45%	5.000		Pembangunan Jaringan Air Bersih Perdesaan		Cakupan layanan air minum		
2	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Cakupan Pelayanan Air Minum	73-74%	750		Kegiatan dihapus.				
	Kegiatan baru.					44	Workshop Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab/Kota	Jawa Barat	Proseding hasil Workshop	1 dokumen	179
	Kegiatan baru.						Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum	Jawa Barat	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik (%)	68,00%	

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
6	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Kab. Kuningan, Kab. Tasikmalaya, Kab. Subang	Cakupan layanan air limbah domestik	67-68%	300		Kegiatan dihapus.				
7	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi di Jawa Barat	27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat	Cakupan layanan air limbah domestik	67-68%	650	45	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi di Jawa Barat	Jawa Barat	(1) Dokumen fasilitasi dan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota (2) Hasil monitoring pembangunan sanitasi di Jawa Barat	150.000 KK	320
8	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dalam rangka Gerakan Citarum Bestari	Kabupaten Bandung	Cakupan layanan air limbah domestik	67-68%	250	46	GCB-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dalam Rangka Gerakan Citarum Bestari	Kabupaten Bandung	Terfasilitasinya Penyusunan dan Implementasi Dokumen PPSP Kabupaten/Kota di Jawa Barat	27 kabupaten /kota	125
	Kegiatan baru.					47	Penyusunan DED Long Storage Air Hujan Melong di Metropolitan Bandung Raya	Kota Cimahi	Tersusunnya dokumen DED Long Storage Air Hujan Melong di Metropolitan	1 dokumen	496

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Bandung Raya		
	Kegiatan baru.					48	Penyusunan DED Drainase Rancaekek di Metropolitan Bandung	Kabupaten Bandung	Tersusunnya dokumen DED Drainase Permukiman Rancaekek di Metropolitan Bandung Raya	1 dokumen	644
	Kegiatan baru.					49	Penyusunan DED Drainase Gedebage di Metropolitan Bandung	Kota Bandung	Tersusunnya dokumen DED Drainase Permukiman Gedebage di Metropolitan Bandung Raya	1 dokumen	648
	Kegiatan baru.					50	Penyusunan DED Drainase Pagarsih-Pasteur di Metropolitan Bandung	Kota Bandung	Tersusunnya dokumen DED Drainase Permukiman Pagarsih-Pasteur di Metropolitan Bandung Raya	1 dokumen	648
	Kegiatan baru.					65	Perencanaan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum	3 (tiga) lokasi di sekitar daerah aliran anak sungai Citarum (Sungai Cidurian, Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus) Kota	Tersusunnya dokumen Perencanaan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum	1 dokumen perencanaan	1.273

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
								Bandung			
10	Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka	TPPAS Regional Legok Nangka Desa Ciherang Kec. Nagreg Kab. Bandung	Cakupan layanan persampahan perkotaan oleh sistem regional	35-37%	10.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
11	Pembangunan TPPAS Regional Nambo	TPPAS Regional Nambo Desa Lulut Kec. Klapanunggal Kab. Bogor	Cakupan layanan persampahan perkotaan oleh sistem regional	35-37%	35.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
12	Pengelolaan TPK Sarimukti	Desa Sarimukti, Kec. Cipatat, Kabupaten Bandung Barat	Cakupan layanan persampahan perkotaan	69-70%	11.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
14	Penataan TPA Leuwigajah	Kabupaten Bandung Barat; Kota Cimahi	Cakupan layanan persampahan perkotaan	69-70%	1.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
15	Advisory teknis BPSR	Kota Bandung	Cakupan layanan persampahan perkotaan	69-70%	500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
16	Penyusunan Rencana Induk Persampahan dan TPPAS Regional Ciayumajakuning	Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Kuningan	Cakupan layanan persampahan perkotaan oleh sistem regional	35-37%	3.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
17	Kajian Pengelolaan TPA Bersama Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi	Kota Bogor-Kabupaten Bogor dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi	Cakupan layanan persampahan perkotaan	69-70%	500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				**100**		**Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**				
1	Fasilitasi Rensana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK)	Jawa Barat	Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan resiko bencana	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 6-7 %	100	104	Penyelenggaraan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK)	Provinsi Jawa Barat	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7-6%	90
	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				**28.000**		**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**135.564**
	Kegiatan baru.					82	Kajian Resolusi Konflik Apartemen dan Rusunawa di Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Tersusunnya Kajian Resolusi Konflik Apartemen dan Rusunawa di Provinsi Jawa Barat	1 dokumen kajian	200
	Kegiatan baru.					88	Perancangan Penyediaan Perumahan (Rusunawa)	Seluruh kab./kota di Provinsi Jawa Barat	Tersusunnya Rancangan Penyediaan Perumahan (Rusunawa)	1 dokumen perencanaan	3.310
	Kegiatan baru.					83	Pembentukan Kelompok Kepemilikan Rumah bagi MBR Non Bankable	Jawa Barat	Terbentuknya kelompok kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) *non-bankable*	27 kab/kota	350
	Kegiatan baru.					85	Penyelenggaraan Klinik Rumah	Kota Bandung	Terselenggaranya klinik perumahan sebagai pusat infromasi	27 kab/kota	100

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									terkait perumahan		
30	Strategi Pengembangan Perumahan Perdesaan	Provinsi Jawa Barat	Cakupan Rumah Layak Huni	93,89-94,49%	1.500	93	Penyusunan Strategi dan Program Perumahan di Jawa Barat	Jawa Barat	Tersusunnya Strategi dan Program Perumahan di Jawa barat	1 dokumen strategi	467
31	Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Lahan untuk Pengembangan Perumahan di Kawasan Perbatasan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung	Kota Cirebon, Kab. Subang, Kab. Karawang dan Kab. Bekasi, KSP Pangandaran dan sekitarnya, KSP Garut Selatan dan sekitarnya	Cakupan Rumah Layak Huni	93,89-94,49%	500		Kegiatan dihapus.				
32	Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbatasan Kab. Bandung dan Kab. Sumedang	Cakupan Rumah Layak Huni	93,89-94,49%	500		Kegiatan dihapus.				
33	Kegiatan Identifikasi Penerapan Konsep Hunian Berimbang di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Cakupan Rumah Layak Huni	93,89-94,49%	500		Kegiatan dihapus.				
29	Peningkatan Kualitas Pengembangan Perumahan	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota	Meningkatnya rumah layak huni di 9 kota (20.000 unit)	4.000 unit	25.000		Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) | BTL	8.000 unit rumah di perdesaan 2.000 unit	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	93,89%	-

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
	Perkotaan	Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur						rumah di perkotaan			
	Kegiatan baru.					73	Pendampingan Fasilitator Rutilahu dan Koordinator Kota	Jawa Barat			1.835
	Kegiatan baru.					72	Manajemen Peningkatan Kualitas Rutilahu	Jawa Barat	Meningkatnya rumah layak huni di 9 kota (20.000 unit)	4.000 unit	1.984
	Kegiatan baru.					84	Penyusunan DED Jalan Lingkungan dan Drainase Relokasi Pasca Bencana Alam tahun 2015	Kab. Garut	Tersusunnya dokumen DED Jalan Lingkungan dan Drainase Kawasan Relokasi Pasca Bencana Alam	Jawa Barat	600
	Kegiatan baru.					86	Penyusunan Regulasi Pembuatan Sumur Resapan/Biopori di Lingkungan Perumahan	Kota Bandung	Tersusunnya Regulasi Pembuatan Sumur Bor Resapan/Biopori di Lingkungan Perumahan	1 dokumen	150
	Kegiatan baru.					87	Pembuatan Sumur Resapan/Biopori Percontohan	Kota Bandung	Terlaksananya Pembuatan Sumur	1 kegiatan	100

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Resapan/Biopori Percontohan		
36	Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa	Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeruk Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	93,89-94,49%	18.997	95	Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3JB	Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeruk Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	93,89%	1.575
						96	Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Barat	Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeruk Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung	Terselenggaranya pengelolaan rusunawa Provinsi Jawa Barat	12 bulan	1.974

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
						97	Pematangan Tanah Giriasih dalam rangka peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas Rusunawa	Pasir Impun Kota Bandung	Tersedianya tanah untuk pembangunan rusunawa di Jawa Barat	1 kawasan	533
						98	Pengadaan dan Pemasangan genset serta kelengkapannya (rusunawa Rancaekek)	Rancaekek, Kab. Bandung	Tersedianya dan terpasangnya genset beserta kelengkapanny a di Rusunawa	1 kawasan	200
						99	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek	Rancaekek, Kab. Bandung	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa	1 kawasan	6.934
						100	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Solokan Jeruk	Solokanjer uk, Kab. Bandung	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa	1 kawasan	2.774
						101	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar	Batujajar, Kab. Bandung	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa	1 kawasan	1.205
						102	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Ujungberung	Ujungberu ng, Kota Bandung	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa	1 kawasan	2.799
	Kegiatan baru.					75	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Sukabumi	Kota Sukabumi	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	93,89%	3.309

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
	Kegiatan baru.					76	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Cirebon	Kota Cirebon	Tertatanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1 kawasan	3.309
	Kegiatan baru.					92	Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Jawa Barat	Jawa Barat			471
	Kegiatan baru.					74	Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan Indramayu	Kab. Indramayu	Tersedianya kajian identifikasi penataan lingkungan permukiman kumuh perkotaan di Indramayu	1 kawasan	270
	Kegiatan baru.					89	Penyusunan Kajian Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Pantura Jabar	Jawa Barat	Tersusunnya Kajian Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Pantura Jawa Barat	1 dokumen kajian	465
	Kegiatan baru.					90	Penyusunan Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan di Kawasan Strategis Provinsi Pangandaran dan Sekitarnya	Jawa Barat	Tersusunnya Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan di Kawasan Strategi Provinsi Pangandaran	1 dokumen strategi	431

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									dan Sekitarnya		
	Kegiatan baru.					91	Penyusunan Kajian Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan	Jawa Barat	Tersusunnya Kajian Teknis Pengembangan dan Peningkatan kualitas permukiman perdesaan	1 dokumen kajian	393
	Program Penataan Ruang				**80.200**						
21	Evaluasi Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	Provinsi Jawa Barat	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
22	Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentase ketersediaan rencana RTH Publik di Kota atau kawasan perkotaan di Jawa Barat	96.3%	750	507	Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Jawa Barat	Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	5 lokasi	650
23	Review Naskah Akademis dan Raperda RTR KSP BIJB dan Kertajati Aerocity	Kabupaten Kuningan	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	500	508	Penyusunan Kajian Teknis Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat	Jawa Barat	Tersusunnya dokumen rencana tindak ruang terbuka hijau/ruang terbuka publik perkotaan	5 laporan pendahuluan, 5 laporan antaran 5 laporan akhir, 5 dokumen amdal	500

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
24	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Koridor Purwakarta-Padalarang	Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	500	71	Penyusunan perencanaan Landscape Masjid Raya Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Tersusunnya dokumen perencanaan Landscape Masjid Raya Provinsi Jawa Barat	1. 3 dokumen laporan; 2. 5 buku laporan harian, 5 buku laporan bulanan, 5 buku laporan akhir; 3. 1 lokasi	1.474
25	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
26	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	400		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
57	Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
58	Penyusunan Kajian Teknis RTR KSP Bandung Utara	Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	800		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
18	Penataan Kawasan Monumen Perjuangan Tahap II	Kota Bandung, Pembangunan (lanjutan) Penataan Monumen Perjuangan Jawa Barat) segmen 2 & 3	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	75.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
19	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Permukiman Baru PKN-P Rancabuaya dan Kalipucang Kabupaten Pangandaran	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	750		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman										
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				**484.796**						
34	Pembangunan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di Gedebage	Kota Bandung	Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang	79.17%	434.796		Kegiatan dihapus.				
35	Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat	1. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor 2. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur 3. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Losari Kabupaten	Cakupan Rumah Layak Huni	93,89-94,49%	50.000	77	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon	Plumbon Kab. Cirebon	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	2.650
						78	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur	Cipeuyeum, Kab. Cianjur	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	15.828
						79	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cikembar	Cimangkok, Kab. Sukabumi	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	14.909

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
		Cirebon (Lanjutan) 4. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan) 5. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya (Lanjutan) 6. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi (Lanjutan) 7. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut (Lanjutan)					Sukabumi (Lanjutan)				
						80	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan)	Kab. Pangandaran	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	10.945
						81	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut (Lanjutan)	Kab. Garut	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	13.966
						500	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Cianjur	Cibinong, Kab. Cianjur	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	8.418
						501	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi	Kab. Sukabumi	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	12.943
						502	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka	Kertajati Kab. Majalengka	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	9.338
						504	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya	Cikalong Kab. Tasikmalaya	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	1 lokasi	8.204

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
							Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan				**3.166**
	Kegiatan baru.					12	Sosialisasi tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Jawa Barat	Terpenuhinya sosialisasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Jawa Barat	100 orang	227
	Kegiatan baru.					13	Koordinasi dan Konsultasi persiapan pegadaan tanah bagi kepentingan umum	Jawa Barat	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi sebagai persiapan pengadaan tanah bagi kepentingan umum	100%	264
	Kegiatan baru.					14	Koordinasi Penatagunaan Tanah kab/kota se Jawa Barat	Jawa Barat	Tercapainya koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	27 kab/kota	226
	Kegiatan baru.					15	Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jawa Barat	Tersedianya data dan informasi penguasaaan dan konflik pertanahan untuk kepentingan strategis provinsi.	27 kab/kota	448

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
	Kegiatan baru.					506	Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Kawasan Perkotaan Kab./Kota di Provinsi Jawa Barat	Tersusunnya peta dasar skala detail pada lima wilayah perkotaan di Jawa Barat.	5 kawasan perkotaan	2.000
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah				**200**		**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**94**
54	Perencanaan sektor lingkup Disperkim	Kota Bandung	Tingkat kesesuaian perencanaan provinsi, pusat dan kab/kota	95%	200	105	Perencanaan sektor lingkup Disperkim	Jawa Barat	Tingkat kesesuaian perencanaan provinsi, pusat dan kab/kota	95%	94
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				**250**		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**239**
55	Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal	Kota Bandung	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi	100%	100	108	Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal	Jawa Barat	Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi	100%	50
13	Monitoring dan Verifikasi Bantuan Gubernur Bidang Permukiman dan Perumahan	Provinsi Jawa Barat	Terlaksanaanya bantuan gubernur bidang Ciptakarya	1. Terverifikasinya usulan bidang ciptakarya; 2. Terfasilitasinya penadatanganan NPHD 100%	150	109	Pelaksanaan monitoring bantuan gubernur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jawa Barat	Terlaksanaanya bantuan gubernur bidang Ciptakarya	1. Terverifikasinya usulan bidang ciptakarya; 2. Terfasilitasinya penadatanganan NPHD 100%	50

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
56	Pengelolaan Keuangan Dinas Permukiman dan Perumahan	Kota Bandung	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	100%	100	110	Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Kota Bandung	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran	100%	139
	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur				**2.012**		**Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**				**1.256**
37	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah	65%	1.400	231	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	197
						233	Pengadaan Pakaian Olahraga Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Pakaian Olah Raga Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	315
						234	Peningkatan Kapasitas ASN Diskimrum Melalui Diklat	Kota Bandung	Meningkatnya Kapasitas ASN Dinas Perumahan dan Permukiman Melalui Diklat	12 bulan	93
						235	Pengadaan Bahan Obat-obatan Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Bahan Obat-obatan Dinas Perumahan dan Permukiman	12 bulan	80

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Provinsi Jawa Barat		
						236	Pengadaan Jasa Profesi Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Tenaga Administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	529
						237	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/ Tempat/Kamar/Gudang Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	7
38	Peningkatan Kesejahteraan dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BPMKL-Diskimrum	Kota Bandung; Provinsi DKI Jakarta	Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah	65%	250		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
39	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPSR	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah	65%	30		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
40	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BP3JB	Rancaekek, Solokanjeruk Kab.Rancaekek, Ujungberung Kota Bandung dan Batujajar Kab. Bandung Barat	Persentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar daerah	65%	82	239	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BP3JB				35
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur				**19.971**		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**3.635**
50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin setiap OPD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB	300 unit	3.988	117	Pengadaan Alat listrik dan Elektronik kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	50
						118	Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	40
						119	Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Bahan Bakar Minyak/Gas Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	106

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
						120	Pengadaan Operasional/PAC Sumur Air Bersih kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Operasional/PAC Sumur Air Bersih Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	50
						121	Pengadaan Jasa KIR Kendaraan Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Jasa KIR Kendaraan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	17
						122	Penyediaan Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	29
						123	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa	12 bulan	1.060

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Barat		
						124	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	546
						125	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	134
						127	Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	17
						128	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Air Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Air	12 bulan	290

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat		
						129	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	170
						130	Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	248
						131	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Bukan Gedung Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bukan Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	248

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
						132	Pembayaran Iuran Sampah Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Pembayaran Iuran Sampah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	25
51	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran BPMKL	Kota Bandung	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin setiap OPD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB	300 unit	1.350		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BPSR	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Cimahi	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin setiap OPD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB	300 unit	9.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
53	Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin setiap OPD/Balai/UPT/ UPTD/UPTB	300 unit	5.633	206	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BP3JB	12 bulan	169
						207	Penyediaan bahan bakar kendaraan dan mesin di Rusunawa Pemprov Jabar	Jawa Barat	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Bermesin di Rusunawa Pemprov Jabar	12 bulan	39

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
						209	Pangadaan bahan baku bangunan pada pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar	Jawa Barat	Tersedianya Bahan Baku Bangunan pada Penglolaan Rusunawa Pemprov Jabar	12 bulan	196
						215	Perawatan kendaraan bermotor dan mesin pada rusunawa BP3JB	Jawa Barat	Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor Dan Mesin pada Rusunawa BP3JB	12 bulan	132
						216	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Jasa Perbaiakan Peralatan Kerja BP3JB	12 bulan	70
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran				**9.750**		**Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran**				**3.117**
46	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	150 buah	4.750	111	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	863
						112	Pengadaan peralatan gedung kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	145

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
						113	Pengadaan mebeleur Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Meubelair Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	330
						114	Pengadaan Peralatan Dapur Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Peralatan Dapur Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	35
						115	Pengadaan Alat Komunikasi Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Alat Komunikasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	15
						116	Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Konstruksi Fisik/Banguna n Bukan Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	980
						126	Penyediaan Jasa Konsultansi Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Konsultansi	12 bulan	50

Rancangan Awal RKPD 2017[1]						Hasil Analisis Kebutuhan[2]					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat		
47	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur BPMKL-Diskimrum	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	150 buah	1.500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
48	Peningkatan Sarana dan Prasarana BP3JB	Kota Bandung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	150 buah	2.499	161	Pengadaan perlengkapan gedung kantor BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor BP3JB	12 bulan	500
						163	Pengadaan peralatan gedung kantor BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor BP3JB	12 bulan	200
49	Peningkatan Sarana dan Prasarana BPSR (Revitalisasi)	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur	150 buah	1.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				**9.040**		**Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**				**9.565**
41	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat; Provinsi DKI Jakarta	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan	100%	3.503	178	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	683

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
			fungsinya			179	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	597
						180	Penyediaan Jasa Keamanan GOR Jatinangor	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Keamanan GOR Jatinangor	12 bulan	200
						181	Penyediaan Jasa Kebersihan GOR Jatinangor	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Kebersihan GOR Jatinangor	12 bulan	290
						182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik GOR I-III Jatinangor	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik GOR I-III Jatinangor	12 bulan	75
						183	Penyediaan Alat Tulis Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	195
						184	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Perumahan dan	12 bulan	200

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									Permukiman Provinsi Jawa Barat		
						185	Penyediaan Makanan dan Minuman Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Makanan dan Minuman Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	492
						186	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Diskimrum	Kota Bandung	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	960
						187	Penyediaan Benda-benda POS Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Benda-benda POS Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	42
						188	Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Dinas Perumahan	12 bulan	15

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
									dan Permukiman Provinsi Jawa Barat		
						189	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Diskimrum	Kota Bandung	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	12 bulan	700
42	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPMKL-Diskimrum	Kota Bandung	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	2.000		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				
45	Peningkatan dan Pelayanan BPMKL	Kota Bandung	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	500		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
43	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3JB	Kab. Bandung; Kab. Bandung Barat; Kota Bandung	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	2.287	205	Penyediaan Alat Tulis Kantor BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Alat Tulis Kantor BP3JB	12 bulan	69
						208	Penyediaan peralatan rumah tangga BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga BP3JB	12 bulan	16
						210	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik BP3JB	12 bulan	572
						211	Penyediaan jasa surat menyurat BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	9
						212	Iuran Wajib Tahunan pada Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar	Jawa Barat	Terpenuhinya Iuran Wajib Tahunan pada Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar	12 bulan	32
						213	Penyediaan jasa kebersihan kantor BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor BP3JB	12 bulan	2.340

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
						214	Pengadaan Jasa Keamanan rusunawa dan kantor balai BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Jasa Keamanan Rusunawa dan Kantor Balai BP3JB	12 bulan	1.556
						217	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan BP3JB	12 bulan	24
						218	Penyediaan makanan dan minuman BP3JB	Jawa Barat	Tersedianya Makanan dan Minuman BP3JB	12 bulan	91
						219	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BP3JB	Jawa Barat	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah BP3JB	12 bulan	132
						220	Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran di setiap lokasi rusunawa	Jawa Barat	Terlaksananya Pelatihan Penaggulangan Bahaya Kebakaran di setiap Lokasi Rusunawa	12 bulan	198
						221	Penyusunan SOP BP3JB	Jawa Barat	Terlaksananya Penyusunan SOP BP3JB	12 bulan	50
						222	Uji Kompetensi tenaga pengelola BP3JB	Jawa Barat	Terlaksananya Uji Kompetensi Tenaga Pengelola BP3JB	12 bulan	27

Rancangan Awal RKPD 2017(1)						Hasil Analisis Kebutuhan(2)					
No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)	No*	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (juta rupiah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[9]	[10]	[11]
44	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPSR	Kota Bandung	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPTD yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	750		Kegiatan menjadi wewenang OPD lain.				

Catatan: (*) Nomor disesuaikan dengan nomor kegiatan pada sumber dokumen

Sumber: (1) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, (2) DPA Murni 2017 Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat

2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

Penelaahan Dinas Perumahan dan Permukiman terhadap usulan program kegiatan masyarakat tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel II.5**.

Tabel II.5 Kajian Usulan Kegiatan Masyarakat Provinsi Jawa Barat 2017

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/ Sumber Usulan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Air Minum	**SUBTOTAL**	Cakupan Pelayanan Air Minum	**157.875.050.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Bandung		400.000.000,00	
		Kab. Ciamis		5.907.000.000,00	
		Kab. Cirebon		2.500.000.000,00	
		Kab. Indramayu		3.100.000.000,00	
		Kab. Karawang		30.300.000.000,00	
		Kab. Majalengka		10.871.450.000,00	
		Kab. Subang		6.000.000.000,00	
		Kab. Sukabumi		40.000.000.000,00	
		Kab. Sumedang		10.496.600.000,00	
		Kota Bandung		5.000.000.000,00	
		Kota Banjar		7.500.000.000,00	
		Kota Depok		33.600.000.000,00	
		Kota Tasikmalaya		2.200.000.000,00	
2	Air Limbah	**SUBTOTAL**	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	**233.430.000.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Bandung		5.800.000.000,00	
		Kab. Bogor		8.710.000.000,00	
		Kab. Cirebon		12.700.000.000,00	
		Kab. Kuningan		80.750.000.000,00	
		Kab. Pangandaran		4.000.000.000,00	
		Kab. Sukabumi		13.600.000.000,00	
		Kab. Sumedang		79.050.000.000,00	
		Kota Bandung		4.500.000.000,00	
		Kota Banjar		1.150.000.000,00	
		Kota Bogor		1.200.000.000,00	
		Kota Cimahi		4.500.000.000,00	
		Kota Depok		10.510.000.000,00	
		Kota Sukabumi		1.500.000.000,00	
		Kota Tasikmalaya		5.460.000.000,00	
3	Persampahan	**SUBTOTAL**	Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	**151.940.317.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Bandung		3.500.000.000,00	
		Kab. Bogor		8.649.625.000,00	
		Kab. Ciamis		1.350.000.000,00	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/ Sumber Usulan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Kab. Cianjur		21.806.950.000,00	
		Kab. Cirebon		850.000.000,00	
		Kab. Garut		3.050.000.000,00	
		Kab. Karawang		4.925.000.000,00	
		Kab. Kuningan		5.075.000.000,00	
		Kab. Pangandaran		4.400.000.000,00	
		Kab. Sukabumi		7.710.000.000,00	
		Kab. Sumedang		2.700.000.000,00	
		Kota Bandung		3.000.000.000,00	
		Kota Banjar		7.539.000.000,00	
		Kota Bogor		20.000.000.000,00	
		Kota Cimahi		8.650.000.000,00	
		Kota Depok		29.596.000.000,00	
		Kota Sukabumi		7.558.742.000,00	
		Kota Tasikmalaya		11.580.000.000,00	
4	Perumahan	**SUBTOTAL**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	**160.679.282.760,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Bandung		11.400.000.000,00	
		Kab. Bogor		45.024.782.760,00	
		Kab. Karawang		1.210.000.000,00	
		Kab. Kuningan		63.025.000.000,00	
		Kab. Majalengka		3.000.000.000,00	
		Kab. Pangandaran		792.000.000,00	
		Kab. Sumedang		15.620.000.000,00	
		Kota Banjar		4.500.000.000,00	
		Kota Bogor		3.500.000.000,00	
		Kota Cimahi		7.500.000,00	
		Kota Sukabumi		5.000.000.000,00	
		Kota Tasikmalaya		7.600.000.000,00	
5	Penataan Ruang	**SUBTOTAL**	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	**189.670.000.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Bogor		3.000.000.000,00	
		Kab. Indramayu		10.950.000.000,00	
		Kab. Kuningan		2.000.000.000,00	
		Kab. Majalengka		5.020.000.000,00	
		Kab. Sumedang		17.700.000.000,00	
		Kab. Tasikmalaya		2.300.000.000,00	
		Kota Cirebon		56.000.000.000,00	
		Kota Depok		1.600.000.000,00	
		Kota Tasikmalaya		91.100.000.000,00	
6	PBL	**SUBTOTAL**	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka	**290.675.150.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Bandung		14.700.000.000,00	
		Kab. Bandung Barat		74.700.000.000,00	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/ Sumber Usulan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Kab. Ciamis	Publik/Revitalisasi Kawasan	11.982.870.000,00	
		Kab. Cirebon		2.000.000.000,00	
		Kab. Karawang		50.700.000.000,00	
		Kab. Kuningan		39.600.000.000,00	
		Kab. Pangandaran		3.500.000.000,00	
		Kab. Sumedang		33.084.000.000,00	
		Kota Banjar		56.500.000.000,00	
		Kota Bogor		3.908.280.000,00	
7	PKP	**SUBTOTAL**	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	**7.500.000.000,00**	Forum OPD 2016
		Kota Sukabumi		7.500.000.000,00	
8	Drainase	**SUBTOTAL**	Cakupan Pelayanan Drainase	**89.425.000.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Cirebon		2.000.000.000,00	
		Kab. Karawang		11.000.000.000,00	
		Kab. Kuningan		500.000.000,00	
		Kota Bandung		6.000.000.000,00	
		Kota Banjar		69.925.000.000,00	
9	Jasa Konstruksi	**SUBTOTAL**	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertikat	**217.050.000.000,00**	Forum OPD 2016
		Kab. Cirebon		5.500.000.000,00	
		Kab. Karawang		450.000.000,00	
		Kab. Kuningan		135.900.000.000,00	
		Kab. Sumedang		61.850.000.000,00	
		Kota Banjar		13.350.000.000,00	
Total				**1.498.244.799.760,00**	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2017 berada pada tahap jangka menengah yang ketiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019, maupun yang dirumuskan dalam RKP 2017 (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD 2017 yang direncanakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disperkim Provinsi Jawa Barat. Identifikasi kebijakan nasional dapat dilihat pada **Tabel III.1**.

Tabel III.1 Identifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat

No	Kebijakan Nasional		Keterangan
1	**RPJP 2005-2025**		
	a	Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi	
	b	Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya	
	c	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi	
2	**RPJMN 2015-2019**		
	a	Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang.	
	b	Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian.	
	c	Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang.	
	d	Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.	

No	Kebijakan Nasional		Keterangan
3	**BAPPENAS**		Akses penduduk terhadap sanitasi layak 100%
	a	Meningkatkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan *demand* atas sanitasi layak	
	b	Implementasi penuh strategi sanitasi pada kabupaten/kota dengan prioritas sanitasi tinggi	
	c	Minimalisasi timbulan sampah, air limbah, dan limpasan air hujan	
	d	Perbaikan sistem *on-site* dan percepatan sistem *off-site*	
	e	Peningkatan operasi dan kelembagaan penyelenggaraan pelayanan sanitasi.	
4	**BAPPENAS**		Akses penduduk terhadap air minum layak 100%
	a	Memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan (4K) pelayanan air minum untuk standar pelayanan minimum (SPM) dan peningkatan ekonomi	
	b	Restrukturisasi kelembagaan penyelenggara air minum dan air baku air minum	
	c	Mobilisasi peran serta masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	
	d	Integrasi sumber-sumber pendanaan	
5	**Direktorat PAM - DJCK Kementerian PUPR**		
	a	Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal dan memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk MBR	
	b	Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi	
	c	Meningkatkan/ memperluas akses air minum jaringan perpipaan terlindungi	
	d	Meningkatkan kualitas air minum	
	e	Menurunkan tingkat kehilangan air	
	f	Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.	
	g	Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemda dalam pendanaan SPAM.	
	h	Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).	
	i	Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah.	
	j	Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan SPAM	
	k	Memperkuat kapasitas SDM tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM.	
	l	Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota.	
	m	Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM.	
	n	Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara SPAM.	
	o	Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of*	

No	Kebijakan Nasional		Keterangan
		Excellent.	
	p	Mengembangkan manajemen aset dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan.	
	q	Mengembangkan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan SPAM Regional.	
6	**Direktorat PPLP - DJCK Kementerian PUPR**		
	a	Peningkatan Kesadaran Masyarakat	
	b	Peningkatan Kepedulian dan Komitmen PEMDA	
	c	Peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM	
	d	Peningkatan akses air limbah layak	
	e	Kerjasama lintas sektor	
	f	Pengembangan skala penanganam	
	g	Peningkatan kualitas perencanaan air limbah	
	RAD 100-0-100		

Sumber: www.bappenas.go.id, www.ciptakarya.go.id.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025. Dimana pada periode tersebut dicanangkan sebagai periode **Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh.** Pada tahun 2017 merupakan juga keberlanjutan pembangunan dari Kepala Daerah yang terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013.

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah **Terwujudnya Perumahan & Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan**. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Diskimrum Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan dicapai, adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Didukung oleh Infrastruktur Permukiman yang Handal;

Tujuan 1.1 : Mewujudkan Perumahan yang Berkualitas dan Terjangkau di Jawa Barat

Sasaran 1.1.1 : Meningkatknya jumlah rumah layak huni (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 5/Strategi 1/Kebijakan 1)

Tujuan 1.2 : Mewujudkan Infrastruktur Permukiman yang Handal

Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 3/Strategi 1/Kebijakan 1 & 2)

Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 4/Strategi 1/Kebijakan 1)

Sasaran 1.2.3 : Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan timbulan sampah di sumber dengan pola 3R (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 1/Strategi 1/Kebijakan 1 & 2)

Tujuan 1.3 : Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Layak Huni bagi Masyarakat

Sasaran 1.3.1 : Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 5/Strategi 1/Kebijakan 2)

Sasaran 1.3.2 : Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 4/Tujuan 2/Sasaran 1/Indikator 5/Strategi 1/Kebijakan 2)

Misi 2 : Menyiapkan Perencanaan Pengadaan Lahan dan Menertibkan Tata Kelola Pertanahan;

Tujuan 2.1 : Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan yang Tertib

Sasaran 2.1.1 : Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 3/Tujuan/Sasaran 3/Indikator 1)

Misi 3 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Tujuan 3.1 : Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Sasaran 3.1.1 : Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 3/Tujuan/Sasaran 2/Indikator 1)

Sasaran 3.1.2 : Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Tercantum dalam Pohon Kinerja Jawa Barat 2017: Misi 3/Tujuan/Sasaran 1/Indikator 1)

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

Dalam menjalankan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan otonomi daerah maka Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 9 (sembilan) Program Pokok yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
3. Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6. Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel III.2**.

Tabel III.2 Rumusan Rencana Program Kegiatan Disperkim Tahun 2018

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1				**URUSAN WAJIB**							
1	4			**Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**193.615,748**	**144.908,000**		**2.790.800,000**
				Program Pembinaan Jasa Konstruksi				**500,000**	**-**		**1.500,00**
				Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung				**500,000**	**-**		**1.500,00**
1	4	18	3	Kegiatan Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Jawa Barat	93,89%	500,000		94,49%	1.500,00
1	4	21		**Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**				**36.480,075**	**34.893,00**		**2.000.100,00**
				Seksi Penyediaan Air Minum				**32.058,000**	**5.000,00**		**900.000,00**
1	4	21	40	Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum (%)	Metropolitan Bandung Raya	73,00%	30.565,000	-	74,00%	900.000,00
1	4	21	41	Penyelenggaraan Program Pamsimas		Seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat		458,000	-		
1	4	21	42	Penyusunan Kajian Teknis Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat		Provinsi Jawa Barat		60,000	-		
1	4	21	43	Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung		Metropolitan Bandung Raya		975,000	-		
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Perdesaan					5.000,00		
				Seksi Drainase dan Air Limbah				**3.059,475**	**29.893,00**		**700.000,00**
1	4	21	44	Workshop Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab/Kota	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik (%)	Jawa Barat	68,00%	178,500		71,00%	700.000,00
				Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum		Jawa Barat			29.893,00		

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	21	45	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi di Jawa Barat		Jawa Barat		319,525			
1	4	21	46	GCB-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dalam Rangka Gerakan Citarum Bestari		Kabupaten Bandung		125,000			
1	4	21	47	Penyusunan DED Long Storage Air Hujan Melong di Metropolitan Bandung Raya		Kota Cimahi		496,450			
1	4	21	48	Penyusunan DED Drainase Rancaekek di Metropolitan Bandung		Kabupaten Bandung		644,000			
1	4	21	49	Penyusunan DED Drainase Gedebage di Metropolitan Bandung		Kota Bandung		648,000			
1	4	21	50	Penyusunan DED Drainase Pagarsih-Pasteur di Metropolitan Bandung		Kota Bandung		648,000			
				Seksi Persampahan				**1.362,600**			**400.100,00**
1	4	21	65	Perencanaan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan sampah di sumber dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R)	3 (tiga) lokasi di sekitar daerah aliran anak sungai Citarum (Sungai Cidurian, Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus) Kota Bandung	66,78%	1.273,000		67,30%	400.000,00
1	4	42	104	Penyelenggaraan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK)	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Provinsi Jawa Barat	7-6%	89,600		7-6%	100,00

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	22		**Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**135.563,999**	**110.015,00**		**740.000,00**
				Seksi Rumah Umum				**4.426,935**	**-**		**100.000,00**
1	4	22	82	Kajian Resolusi Konflik Apartemen dan Rusunawa di Provinsi Jawa Barat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Kota Bandung	93,89%	200,000		94,49%	100.000,00
1	4	22	88	Perancangan Penyediaan Perumahan (Rusunawa)		Seluruh kab./kota di Provinsi Jawa Barat		3.309,850			
1	4	22	83	Pembentukan Kelompok Kepemilikan Rumah bagi MBR Non Bankable		Jawa Barat		350,000			
1	4	22	85	Penyelenggaraan Klinik Rumah		Kota Bandung		100,000			
1	4	22	93	Penyusunan Strategi dan Program Perumahan di Jawa Barat		Jawa Barat		467,085			
				Seksi Rumah Khusus dan Swadaya				**4.668,700**	**110.015,00**		**400.000,00**
				Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) | BTL	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	8.000 unit rumah di perdesaan 2.000 unit rumah di perkotaan	93,89%	-	110.015,00	94,49%	400.000,00
1	4	22	73	Pendampingan Fasilitator Rutilahu dan Koordinator Kota		Jawa Barat		1.834,700	-		
1	4	22	72	Manajemen Peningkatan Kualitas Rutilahu		Jawa Barat		1.984,000	-		
1	4	22	84	Penyusunan DED Jalan Lingkungan dan Drainase Relokasi Pasca Bencana Alam tahun 2015		Kab. Garut		600,000			
1	4	22	86	Penyusunan Regulasi Pembuatan Sumur Resapan/Biopori di Lingkungan Perumahan		Kota Bandung		150,000	-		
1	4	22	87	Pembuatan Sumur Resapan/Biopori Percontohan		Kota Bandung		100,000			

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
				BP3JB				**17.994,794**	**-**		**20.000,00**
1	4	22	95	Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3JB	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeruk Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung	93,89%	1.575		94,49%	20.000,00
1	4	22	96	Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Barat		Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeruk Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung		1.974			
1	4	22	97	Pematangan Tanah Giriasih dalam rangka peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas Rusunawa		Pasir Impun Kota Bandung		533			
1	4	22	98	Pengadaan dan Pemasangan genset serta kelengkapannya (rusunawa Rancaekek)		Rancaekek, Kab. Bandung		200			
1	4	22	99	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek		Rancaekek, Kab. Bandung		6.934			
1	4	22	100	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Solokan Jeruk		Solokanjeruk, Kab. Bandung		2.774			
1	4	22	101	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar		Batujajar, Kab. Bandung		1.205			
1	4	22	102	Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Ujungberung		Ujungberung, Kota Bandung		2.799			
				Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan				**7.089,205**	**-**		**30.000,00**
1	4	22	75	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Sukabumi	Cakupan Ketersediaan	Kota Sukabumi	93,89%	3.309,000		94,49%	30.000,00

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	22	76	Penataan Kawasan Kumuh di Kota Cirebon	Rumah Layak Huni (%)	Kota Cirebon		3.309,000			
1	4	22	92	Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Jawa Barat		Jawa Barat		471,205			
				Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan				**1.559,190**	**-**		**30.000,00**
1	4	22	74	Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan Indramayu	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Kab. Indramayu	93,89%	270,000		94,49%	30.000,00
1	4	22	89	Penyusunan Kajian Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Pantura Jabar		Jawa Barat		465,030			
1	4	22	90	Penyusunan Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan di Kawasan Strategis Provinsi Pangandaran dan Sekitarnya		Jawa Barat		431,030			
1	4	22	91	Penyusunan Kajian Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan		Jawa Barat		393,130			
				Seksi Sarana Kawasan Permukiman				**99.825,175**	**-**		**160.000,00**
1	4	22	507	Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	Jawa Barat	5 lokasi	650,000	-	5 lokasi	160.000,00
1	4	22	508	Penyusunan Kajian Teknis Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat		Jawa Barat		500,000	-		
1	4	22	71	Penyusunan perencanaan Landscape Masjid Raya Provinsi Jawa Barat		Kota Bandung		1.473,600	-		

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	22	77	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon		Plumbon Kab. Cirebon		2.649,700	-		
1	4	22	78	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur		Cipeuyeum, Kab. Cianjur		15.827,750	-		
1	4	22	79	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cikembar Sukabumi (Lanjutan)		Cimangkok, Kab. Sukabumi		14.908,775	-		
1	4	22	80	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan)		Kab. Pangandaran		10.945,325			
1	4	22	81	Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut (Lanjutan)		Kab. Garut		13.966,275	-		
1	4	22	500	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Cianjur		Cibinong, Kab. Cianjur		8.418,400			
1	4	22	501	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi		Kab. Sukabumi		12.943,300			
1	4	22	502	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka		Kertajati Kab. Majalengka		9.337,950			
1	4	22	504	Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya		Cikalong Kab. Tasikmalaya		8.204,100			

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	38		**Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan**				**3.165,880**	**-**	**-**	**12.000,00**
				Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah				**491,400**	**-**		**2.000,00**
1	4	38	12	Sosialisasi tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (%)	Jawa Barat	100%	227		100,00%	2.000,00
1	4	38	13	Koordinasi dan Konsultasi persiapan pegadaan tanah bagi kepentingan umum		Jawa Barat		264			
				Seksi Penatagunaan Tanah				**674,480**	**-**		**2.000,00**
1	4	38	14	Koordinasi Penatagunaan Tanah kab/kota se Jawa Barat	Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (%)	Jawa Barat	40,00%	226		60,00%	2.000,00
1	4	38	15	Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan untuk Kepentingan Strategis Provinsi		Jawa Barat		448			
				Seksi Data & Informasi				**2.000,000**	**-**		**8.000,00**
1	4	22	506	Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)	Kawasan Perkotaan Kab./Kota di Provinsi Jawa Barat	10 kawasan	2.000,000		10 kawasan	8.000,00

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	98		**Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**94,000**			**400,00**
				Subbagian Perencanaan dan Pelaporan				**94,000**			**400,00**
1	4	98	105	Perencanaan sektor lingkup Disperkim	Jumlah dok perencanaan, evaluasi, dan/atau pelaporan (%)	Jawa Barat	100%	94,000		100,00%	400,00
1	4	101		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**				**238,800**			**800,00**
				Subbagian Perencanaan dan Pelaporan				**100,000**			**400,00**
1	4	101	108	Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal		Jawa Barat	100%	50,000		100,00%	400,00
1	4	101	109	Pelaksanaan monitoring bantuan gubernur bidang perumahan dan kawasan permukiman		Jawa Barat		50,000			
				Subbagian Keuangan dan Aset				**138,800**			**400,00**
1	4	101	110	Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah		Kota Bandung	100%	138,800		100,00%	400,00
1	4	103		**Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur**				**1.255,800**			**3.500,00**
				Sekretariat				**1.220,800**			**3.000,00**
1	4	103	231	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Diskimrum	Jumlah SDM aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)	Kota Bandung	28 orang	197,300		28 orang	3.000,00
1	4	103	233	Pengadaan Pakaian Olahraga Diskimrum		Kota Bandung		314,600			
1	4	103	234	Peningkatan Kapasitas ASN Diskimrum Melalui Diklat		Kota Bandung		93,300			
1	4	103	235	Pengadaan Bahan Obat-obatan Diskimrum		Kota Bandung		80,000			
1	4	103	236	Pengadaan Jasa Profesi Diskimrum		Kota Bandung		529,000			

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	103	237	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/ Tempat/Kamar/Gudang Diskimrum		Kota Bandung		6,600			
				BP3JB				**35,000**			**500,00**
1	4	103	239	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BP3JB				35,000			500,00
1	4	109		**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**				**3.634,900**			**13.000,00**
				Sekretariat				**3.028,500**			**10.000,00**
1	4	109	117	Pengadaan Alat listrik dan Elektronik kantor Diskimrum	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Kota Bandung	85%	50,000		85,00%	10.000,00
1	4	109	118	Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kantor Diskimrum		Kota Bandung		40,000			
1	4	109	119	Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Kantor Diskimrum		Kota Bandung		105,600			
1	4	109	120	Pengadaan Operasional/PAC Sumur Air Bersih kantor Diskimrum		Kota Bandung		50,000			
1	4	109	121	Pengadaan Jasa KIR Kendaraan Diskimrum		Kota Bandung		16,500			
1	4	109	122	Penyediaan Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Diskimrum		Kota Bandung		29,000			
1	4	109	123	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Diskimrum		Kota Bandung		1.060,000			
1	4	109	124	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Diskimrum		Kota Bandung		546,450			

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	109	125	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Diskimrum		Kota Bandung		134,200			
1	4	109	127	Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Diskimrum		Kota Bandung		17,150			
1	4	109	128	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Air Diskimrum		Kota Bandung		290,000			
1	4	109	129	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Diskimrum		Kota Bandung		170,000			
1	4	109	130	Pemeliharaan Halaman dan Taman Kantor Diskimrum		Kota Bandung		247,500			
1	4	109	131	Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Bukan Gedung Diskimrum		Kota Bandung		247,500			
1	4	109	132	Pembayaran Iuran Sampah Diskimrum		Kota Bandung		24,600			
				BP3JB				**606,400**			**3.000,00**
1	4	109	206	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BP3JB	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Jawa Barat	85%	169,000		85,00%	.000,00
1	4	109	207	Penyediaan bahan bakar kendaraan dan mesin di Rusunawa Pemprov Jabar		Jawa Barat		39,000			
1	4	109	209	Pangadaan bahan baku bangunan pada pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar		Jawa Barat		196,000			
1	4	109	215	Perawatan kendaraan bermotor dan mesin pada rusunawa BP3JB		Jawa Barat		132,400			

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	109	216	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BP3JB		Jawa Barat		70,000			
1	4	110		**Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran**				**3.117,200**			**5.500,00**
				Sekretariat				**2.417,200**			**3.500,00**
1	4	110	111	Pengadaan perlengkapan gedung kantor Diskimrum	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Kota Bandung	85%	862,600		85,00%	3.500,00
1	4	110	112	Pengadaan peralatan gedung kantor Diskimrum		Kota Bandung		145,000			
1	4	110	113	Pengadaan mebeleur Diskimrum		Kota Bandung		330,000			
1	4	110	114	Pengadaan Peralatan Dapur Diskimrum		Kota Bandung		35,000			
1	4	110	115	Pengadaan Alat Komunikasi Diskimrum		Kota Bandung		15,000			
1	4	110	116	Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Diskimrum		Kota Bandung		979,600			
1	4	110	126	Penyediaan Jasa Konsultansi Diskimrum		Kota Bandung		50,000			
				BP3JB				**700,000**			**2.000,00**
1	4	110	161	Pengadaan perlengkapan gedung kantor BP3JB	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Jawa Barat	85%	500,000		85,00%	2.000,00
1	4	110	163	Pengadaan peralatan gedung kantor BP3JB		Jawa Barat		200,000			
1	4	111		**Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran**				**9.565,094**			**14.000,00**
				Sekretariat				**4.448,306**			**8.000,00**
1	4	111	178	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Diskimrum	Kepuasan masyarakat terhadap	Kota Bandung	85%	682,600		85,00%	8.000,00

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	111	179	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Diskimrum	pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Kota Bandung		597,300			
1	4	111	180	Penyediaan Jasa Keamanan GOR Jatinangor		Kota Bandung		200,000			
1	4	111	181	Penyediaan Jasa Kebersihan GOR Jatinangor		Kota Bandung		290,000			
1	4	111	182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik GOR I-III Jatinangor		Kota Bandung		75,000			
1	4	111	183	Penyediaan Alat Tulis Kantor Diskimrum		Kota Bandung		195,000			
1	4	111	184	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Diskimrum		Kota Bandung		199,500			
1	4	111	185	Penyediaan Makanan dan Minuman Diskimrum		Kota Bandung		491,906			
1	4	111	186	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Diskimrum		Kota Bandung		960,000			
1	4	111	187	Penyediaan Benda-benda POS Diskimrum		Kota Bandung		42,000			
1	4	111	188	Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Diskimrum		Kota Bandung		15,000			
1	4	111	189	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Diskimrum		Kota Bandung		700,000			
				BP3JB				**5.116,788**			**6.000,00**
1	4	111	205	Penyediaan Alat Tulis Kantor BP3JB	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan	Jawa Barat	85%	69,000		85,00%	6.000,00
1	4	111	208	Penyediaan peralatan rumah tangga BP3JB		Jawa Barat		16,200			
1	4	111	210	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BP3JB		Jawa Barat		572,200			

No				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Prakiraan Maju Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (dalam juta rupiah)
								BL	BTL		
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[9]	[10]
1	4	111	211	Penyediaan jasa surat menyurat BP3JB	Perumahan (%)	Jawa Barat		9,480			
1	4	111	212	Iuran Wajib Tahunan pada Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar		Jawa Barat		31,600			
1	4	111	213	Penyediaan jasa kebersihan kantor BP3JB		Jawa Barat		2.339,856			
1	4	111	214	Pengadaan Jasa Keamanan rusunawa dan kantor balai BP3JB		Jawa Barat		1.555,832			
1	4	111	217	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BP3JB		Jawa Barat		24,000			
1	4	111	218	Penyediaan makanan dan minuman BP3JB		Jawa Barat		91,170			
1	4	111	219	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah BP3JB		Jawa Barat		132,300			
1	4	111	220	Pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran di setiap lokasi rusunawa		Jawa Barat		198,350			
1	4	111	221	Penyusunan SOP BP3JB		Jawa Barat		50,000			
1	4	111	222	Uji Kompetensi tenaga pengelola BP3JB		Jawa Barat		26,800			
				Subtotal (Sekretariat)				**11.447,606**			**25.700,000**
				Subtotal (BP3JB)				**6.458,188**			**11.500,000**

Rencana Kerja Disperkim Jawa Barat 2017 terdiri dari 10 program dan 121 kegiatan dengan total pembiayaan sebesar **Rp193.615.748.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah)** yang terdiri atas;

1. **Program Pembinaan Jasa Konstruksi** terdiri dari kegiatan:
   a. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara
2. **Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan** terdiri dari kegiatan:
   a. Sosialisasi tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
   b. Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Pegadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
   c. Koordinasi Penatagunaan Tanah Kab/Kota se-Jawa Barat
   d. Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan untuk Kepentingan Strategis Provinsi
   e. Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3. **Program Penataan Ruang** terdiri dari kegiatan:
   a. Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
   b. Penyusunan Kajian Teknis Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** terdiri dari kegiatan:
   a. Pembangunan SPAM Regional Metropolitan Bandung Wilayah Selatan
   b. Penyelenggaraan Program Pamsimas
   c. Penyusunan Kajian Teknis Peraturan Gubernur Rencana Induk SPAM Jawa Barat
   d. Penyusunan Rencana Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung
   e. Workshop Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab/Kota
   f. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi di Jawa Barat
   g. GCB-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi dalam Rangka Gerakan Citarum Bestari
   h. Penyusunan DED Long Storage Air Hujan Melong di Metropolitan Bandung Raya
   i. Penyusunan DED Drainase Rancaekek di Metropolitan Bandung
   j. Penyusunan DED Drainase Gedebage di Metropolitan Bandung
   k. Penyusunan DED Drainase Pagarsih-Pasteur di Metropolitan Bandung

l. Studi penetapan lokasi TPPAS Regional Bekarpur
m. Kajian Lingkungan TPPAS Regional Bekarpur
n. Perencanaan Penanganan Persampahan di Daerah Aliran Anak Sungai Citarum

3. **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman** terdiri dari kegiatan:
   a. Peningkatan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota se-Jawa Barat
   b. Penyusunan Kajian Teknis Peningkatan Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat
   c. Penyusunan perencanaan Landscape Masjid Raya Provinsi Jawa Barat
   d. Manajemen Peningkatan kualitas Rutilahu
   e. Pendampingan Fasilitator Rutilahu dan Koordinator Kota
   f. Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan Indramayu
   g. Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan Indramayu
   h. Penataan Kawasan Kumuh di Kota Sukabumi
   i. Penataan Kawasan Kumuh di Kota Cirebon
   j. Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon Kabupaten Cirebon
   k. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cianjur
   l. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Cikembar Sukabumi (Lanjutan)
   m. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan)
   n. Pembangunan masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut (Lanjutan)
   o. Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Bogor
   p. Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Sukaraja Kabupaten Sukabumi
   q. Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka
   r. Pembangunan Mesjid Provinsi Jawa Barat di Cikalong Kabupaten Tasikmalaya
   s. Pembangunan Monumen Kerjasama *Sister Province*
   t. Kajian Resolusi Konflik Apartemen dan Rusunawa di Provinsi Jawa Barat
   u. Pembentukan Kelompok Kepemilikan Rumah bagi MBR *Non Bankable*
   v. Penyusunan DED Jalan Lingkungan dan Drainase Relokasi Pasca Bencana Alam tahun 2015
   w. Penyelenggaraan Klinik Rumah
   x. Penyusunan Regulasi Pembuatan Sumur Resapan/Biopori di Lingkungan Perumahan
   y. Pembuatan Sumur Resapan/Biopori Percontohan
   z. Perancangan Penyediaan Perumahan (Rusunawa)

aa. Penyusunan Kajian Infrastruktur Kawasan Minapolitan di Pantura Jabar
bb. Penyusunan Strategi Penanganan Permukiman Perdesaan Berbasis Kebencanaan di Kawasan Strategis Provinsi Pangandaran dan Sekitarnya
cc. Penyusunan Kajian Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Perdesaan
dd. Identifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Jawa Barat
ee. Penyusunan Strategi dan Program Perumahan di Jawa Barat
ff. Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3JB
gg. Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Barat
hh. Pematangan Tanah Giriasih dalam rangka peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas Rusunawa
ii. Pengadaan dan Pemasangan genset serta kelengkapannya (rusunawa Rancaekek)
jj. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek
kk. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Solokan Jeruk
ll. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar
mm. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Ujungberung

4. **Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim** terdiri dari kegiatan:
   a. Penyelenggaraan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK)
5. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Daerah** terdiri dari kegiatan:
   a. Perencanaan Sektor Lingkup Disperkim Jawa Barat
6. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari kegiatan:
   a. Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Internal
   b. Pelaksanaan Monitoring Bantuan Gubernur Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   c. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
7. **Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur** terdiri dari kegiatan:
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Disperkim Jawa Barat
   b. Pengadaan Pakaian Olahraga Disperkim Jawa Barat
   c. Penyediaan Uang Saku Diklat Disperkim Jawa Barat
   d. Pengadaan Bahan Obat-Obatan Disperkim Jawa Barat
   e. Pengadaan Jasa Profesi Disperkim Jawa Barat
   f. Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang Disperkim Jawa Barat
   g. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu BP3JB

8. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari kegiatan:
    a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Disperkim Jawa Barat
    b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Disperkim Jawa Barat
    c. Pengadaan Mebeleur Disperkim Jawa Barat
    d. Pengadaan Peralatan Dapur Disperkim Jawa Barat
    e. Pengadaan Alat Komunikasi Disperkim Jawa Barat
    f. Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung Disperkim Jawa Barat
    g. Penyediaan Jasa Konsultansi Disperkim Jawa Barat
    h. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BP3JB
    i. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BP3JB
9. **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari kegiatan:
    a. Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik Kantor Disperkim Jawa Barat
    b. Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Kantor Disperkim Jawa Barat
    c. Pengadaan Bahan Bakar Minyak/Gas Kantor Disperkim Jawa Barat
    d. Pengadaan Operasional/PAC Sumur Air Bersih Kantor Disperkim Jawa Barat
    e. Pengadaan Jasa KIR Kendaraan Disperkim Jawa Barat
    f. Penyediaan Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan Disperkim Jawa Barat
    g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Disperkim Jawa Barat
    h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Disperkim Jawa Barat
    i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Disperkim Jawa Barat
    j. Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Disperkim Jawa Barat
    k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Air Disperkim Jawa Barat
    l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Disperkim Jawa Barat
    m. Pemeliharaan Halaman Dan Taman Kantor Disperkim Jawa Barat
    n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bukan Gedung Disperkim Jawa Barat
    o. Pembayaran Iuran Sampah Disperkim Jawa Barat
    p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BP3JB
    q. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dan Mesin Di Rusunawa Pemprov Jabar
    r. Pangadaan Bahan Baku Bangunan Pada Pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar
    s. Perawatan Kendaraan Bermotor Dan Mesin Pada Rusunawa BP3JB
    t. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja BP3JB
10. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari kegiatan:
    a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Disperkim Jawa Barat
    b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disperkim Jawa Barat

c. Penyediaan Jasa Keamanan GOR Jatinangor
d. Penyediaan Jasa Kebersihan GOR Jatinangor
e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik GOR I-III Jatinangor
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor Disperkim Jawa Barat
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disperkim Jawa Barat
h. Penyediaan Makanan dan Minuman Disperkim Jawa Barat
i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi Ke Luar Daerah Disperkim Jawa Barat
j. Penyediaan Benda-Benda POS Disperkim Jawa Barat
k. Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Disperkim Jawa Barat
l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Disperkim Jawa Barat
m. Penyediaan Alat Tulis Kantor BP3JB
n. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BP3JB
o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP3JB
p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP3JB
q. Iuran Wajib Tahunan pada Pemeliharaan Pengelolaan Rusunawa Pemprov Jabar
r. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BP3JB
s. Pengadaan Jasa Keamanan Rusunawa dan Kantor Balai BP3JB
t. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BP3JB
u. Penyediaan Makanan dan Minuman BP3JB
v. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah BP3JB
w. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Setiap Lokasi Rusunawa
x. Penyusunan SOP BP3JB
y. Uji Kompetensi Tenaga Pengelola BP3JB

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ini mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan hasil sinergi multi pihak pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, perwujudan visi Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, yaitu "Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia", serta RPJMN Tahun 2014-2019. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sebagai dokumen awal untuk pelaksanaan misi pembangunan Jawa Barat periode 2013-2018 tahun 2017.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi yaitu untuk menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

"Terwujudnya Perumahan & Kawasan Permukiman
Yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan"

Dengan visi tersebut, disusunlah misi, sasaran, program serta kegiatan dengan mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD 2013-2018 dan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sendiri. Program dan kegiatan tahun 2017 ini merupakan salah satu komponen untuk mencapai target pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD 2013-2018 dan pencapaian target Rencana Aksi Daerah 100-0-100 pada tahun 2019.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2017 dengan efektif dan efisien;

2. Penyusunan Renja Tahun 2017 adalah langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2017, dimana Renja Tahun 2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dok pelaksanaan anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Disperkim wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2017, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Disperkim wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2017. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Keuangan;
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Renja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dinas Perumahan dan Permukiman yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga saat ini konsisten untuk melakukan perencanaan pembangunan Bidang Cipta Karya yang dimuat pada Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang mengacu pada Rencana Strategis Cipta Karya Nasional. Tindak lanjut penajaman dan review RPIJM Kabupaten/kota adalah dengan melakukan pendampingan atau asistensi secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Setiap bidang dalam Dinas Perumahan dan Permukiman meliputi Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan, Sekretariat dan Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan wajib memfokuskan program dan kegiatan pada Renja 2018 dan menyelaraskan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra 2013-2018 sehingga target Indikator Kinerja Daerah tercapai. Program dan kegiatan yang terdapat pada Renja 2018 ini bersumber dana

dari APBD Provinsi, akan tetapi pencapaian indikator kinerja daerah merupakan hasil pembangunan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Swasta dan Masyarakat.

LAMPIRAN